

- Afdhal dan Yurniwati, 2015. *Analisis Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Studi Kasus Pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kota Padang Panjang*. Sinopsium Nasional Akuntansi XVIII Medan. 16-19 September 2015.
- Akbar, H. I, 2013. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Yogyakarta: Tesis Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) BPK RI Semester I Tahun 2015*. Jakarta: www.bpk.go.id diakses pada tanggal 7 September 2015.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013. *Internal Control – Integrated Framework*. <http://www.coso.org/>.
- Danumulyo, R.I. 2012. *Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal pada Wisma MM UGM Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Fatmawati, L. I, 2013. *Evaluasi Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga*. Tesis, (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Pemerintah Indonesia, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Pemerintah Indonesia, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
- Pemerintah Indonesia, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
- Pemerintah Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Pemerintah Indonesia, 2004. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
- Pemerintah Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
- Pemerintah Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta: Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
- Pemerintah Indonesia, 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.



ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU

Ayu F.J. Siregar, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.,

Pemerintah Indonesia
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2016. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jakarta: Biro Hukum.

Pemerintah Indonesia, 2008. *Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau*

Pemerintah Indonesia, 2009. *Peraturan Gubernur Riau No. 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau*

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wibisono, T, 2010. *Mencapai Tujuan Nasional bersama SPIP dan Integritas, dan Etika sebagai pilihan*, *Warta Pengawasan Volume XVII, Nomor 2 Juni 2010*. Jakarta: BPKP.